

Pemberdayaan dan Perencanaan Kawasan

Empowerment and Planning Of Agricultural Area

Fery Murtiningrum^{1*)}

¹Mahasiswa Program Doktor Pada Program Studi Ilmu Ilmu Pertanian
Universitas Andalas

^{*)}Penulis untuk korespondensi: ferymurtiningrum@yahoo.co.id

Sitasi: Murtiningrum F. 2020. Empowerment and planning of agricultural area. *In:* Herlinda S *et al.* (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8 Tahun 2020, Palembang 20 Oktober 2020. pp. 344-355. Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

ABSTRACT

Community empowerment is very often discussed in almost all agricultural development activities, but it is a question mark whether community empowerment is really carried out in the process of planning agricultural areas in the context of agricultural development. There is very little data that shows that community empowerment is carried out in the agricultural area planning process. For this reason, this study aims to examine concepts related to empowerment and agricultural area planning. This research is based on a review of the philosophy or concept of empowerment, regional planning in research journals, literature books, national reports, regional and international organizations, thesis, seminar proceedings and others. The main theories used are the concept of empowerment, planning, development, and the area. Based on the results of the analysis of the study, it shows that empowerment plays an important role in the area planning process, so that the planning that has been compiled by the Government is to achieve its goals and can be carried out according to the expected objectives. The active role of the community is important to be involved in every stage of area planning so that at the time of the implementation of the planning results it can be carried out properly and on target.

Keywords: agriculture, area, empowerment, and planning

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat sangat sering di perbincangkan dalam hampir semua kegiatan pembangunan pertanian, tetapi yang menjadi tanda tanya apakah pemberdayaan masyarakat benar benar dilakukan dalam proses perencanaan kawasan pertanian dalam rangka pembangunan pertanian. Sangat sedikit ditemukan data yang menilai bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan pada proses perencanaan kawasan pertanian. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perencanaan kawasan pertanian. Penelitian ini berdasarkan *review* falsafah atau konsep pemberdayaan, perencanaan kawasan di jurnal jurnal penelitian, *literature* buku, laporan nasional, regional dan organisasi internasional, *thesis*, prosiding seminar dan lainnya. Teori teori utama yang digunakan adalah konsep pemberdayaan, perencanaan, pembangunan, dan kawasan. Berdasarkan hasil analisis kajian menunjukkan bahwa pemberdayaan memegang peranan penting dalam proses perencanaan kawasan, agar perencanaan yang telah di susun oleh Pemerintah untuk mencapai sasaran dan bisa dilakukan sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Peran aktif masyarakat penting

dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan kawasan sehingga pada saat pelaksanaan dari hasil perencanaan dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.

Kata kunci: pemberdayaan, perencanaan, kawasan, dan pertanian

PENDAHULUAN

Pembangunan sebagai sebuah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling *humanistic* (Sukino, 2014), atau dengan kata lain proses memanusiakan manusia (Rustiadi *et al.*, 2009). Dalam bidang Pertanian, pembangunan pertanian bertujuan untuk menciptakan kondisi hasil pembangunan yang menciptakan pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan (Suharyanto *et al.*, 2012) untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan menentukan masa depan mereka sendiri dengan berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Noer, 2004). Anwar, (1999) dan Rustiadi *et al.* (2009) menyatakan perubahan baik secara *incremental* maupun paradigma mengarahkan pembangunan wilayah kepada pemerataan (*equity*), yang mendukung pertumbuhan ekonomi (*efficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*), agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok dengan tingkat pendapatan yang berbeda.

Pembangunan tidak terjadi pada semua tempat, melainkan terbatas pada beberapa tempat tertentu atau pada beberapa tata ruang tertentu (Adisasmita, 2010). Pembangunan dilakukan pada kegiatan secara sektor misalnya pertanian, perindustrian, pertambangan, konstruksi/bangunan, perdagangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lainnya. Sektor penting dalam pembangunan adalah bidang pertanian yang merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum (A.T. Mosher, 1966). Pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan suatu proses yang ditujukan untuk menambah produksi pertanian tiap-tiap konsumen, sekaligus mempertinggi pendapatan, produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill. (Sudalmi, 2010), sehingga mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merupakan kendala untuk meraih kesejahteraan.

Kegiatan Pertanian dimulai sejak manusia mulai beralih dari kegiatan berburu ke berpindah pindah tempat pada saat lahan masih banyak, kemudian mulai menetap, melakukan kegiatan pertanian primitif, pertanian tradisional dan modern. Pertanian merupakan kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh tumbuhan dan hewan (Soetriono *et al.*, 2016). Pertanian dalam arti sempit dinamakan pertanian rakyat, dan dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti sempit, Kehutanan. Peternakan, Perkebunan dan Perikanan.

Dalam perjalanan sejarah pembangunan Bangsa Indonesia, pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997, Pertanian adalah sektor yang mampu bertahan menghadapi krisis moneter. Demikian juga di alami oleh negara Korea dan Asia lainnya (Braggion *et al.*, 2009). Popescu, (2014) potensi pertanian Rumania yang cukup menempati bagian penting dalam model pembangunan di Rumania. Pada Pertanian di A.S, kebijakan moneter ketat telah menurunkan harga dan meningkatkan permintaan untuk pertanian domestik (Chambers & Just, 1982). Hal ini menyebabkan pemerintah terus memfokuskan diri pada pembangunan pertanian. Dalam jangka panjang pembangunan pertanian terjadi dalam kerangka transformasi pembangunan nasional yang berporoskan pada transformasi pertanian. Menurut Kementerian Pertanian, (2014) Transformasi pembangunan secara keseluruhan meliputi lima bentuk transformasi, yakni transformasi demografi, transformasi

spasial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola pembangunan dan transformasi kelembangaan. Keseluruhan proses transformasi ini akan berjalan secara berimbang dan sinergis mewujudkan visi dan misi pembangunan pertanian dengan mengacu pada periodisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Transformasi skala besar yang mempromosikan produksi pertanian berkelanjutan di daerah tropis akan menjadi sangat penting bagi keberlanjutan dan pembangunan global (Erbaugh *et al.*, 2019).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*People Centerd, Participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995) dalam (Hadi, 2015). Konsep ini tidak hanya semata mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Pemberdayaan masyarakat secara harfiah menurut Wrihatnolo berarti kedaulatan rakyat dibidang ekonomi, dan kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut penguasaan teknologi, kepemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber sumber informasi, serta keterampilan manajemen. Menurut pandangan peneliti, pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan kawasan pertanian adalah ikut berpartisipasi dan mampu mengkomunikasikan secara berani pandangan dan sikap terhadap sebuah rancangan perencanaan dan terlibat secara aktif dalam proses perencanaan.

Pemberdayaan masyarakat sangat sering di perbincangkan dalam hampir semua kegiatan pembangunan pertanian, tetapi yang menjadi tanda tanya apakah pemberdayaan masyarakat benar benar dilakukan dalam proses perencanaan kawasan pertanian dalam rangka pembangunan pertanian. Sangat sedikit ditemukan data yang menilai bahwa pemberdayaan masyarakat penting dilakukan pada proses perencanaan kawasan pertanian. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perencanaan kawasan pertanian.

PEMBERDAYAAN

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2015) pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat di didik untuk menerapkan setiap inovasi (informasi baru) yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi perbaikan kesejahteraannya. Sumodiningrat (1997) menyatakan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaru kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Upaya memampukan dan memandirikan masyarakat atau dengan kata lain bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri (Hadi, 2015)

Proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia, menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistim pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Sehingga dapat dikatakan Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong,

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan menuju kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk:

- a. Memiliki akses terhadap sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang barang dan jasa jasa yang mereka perlukan
- b. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Kelyes dan Herane (1955) dalam Mardikanto T dan Soebiato P, (2015) menyatakan bahwa falsafah pemberdayaan harus berpihak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Falsafah pemberdayaan adalah *bekerja bersama masyarakat* untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help them selves*).

Dari pemahaman ini terkandung pengertian bahwa:

1. Penyuluh/Fasilitator harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukannya bekerja untuk masyarakat (Adicodro, 1990). Kehadiran penyuluh/fasilitator bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan serta memelihara partisipasi masyarakat.
2. Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptannya kreatifitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan keinginan masyarakat sasarannya.
3. Pemberdayaan yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

Berdasarkan pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistim pendidikan, maka menurut Mardikanto, T dan Soebiato P. (2015) pemberdayaan memiliki prinsip prinsip:

1. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui "mengerjakan" mereka akan mengalami proses belajar (Baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus di ingat untuk jangka waktu yang lama.
2. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik dan bermanfaat, karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa masa mendatang.
3. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengkaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya. Misalnya dengan melihat cangkul orang diingkatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik, melihat tanaman yang kerdil/subur akan mengingatkannya kepada usaha usaha pemupukan dan lain lain.

Lebih lanjut Mardikanto T dan Soebiato P. (2015) mengungkapkan bahwa Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Pembangunan akan selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budaya-nya. Dalam pembangunan pertanian, tujuan dari

pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan meliputi beragam perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*), dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup. Perbaikan pendidikan ini bisa dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan non formal sehingga pengetahuan dan pemahaman lingkungan akan meningkatkan dan memiliki keterampilan untuk melindungi pemukiman (Mandasari, et al, 2016)
2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*). Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, terutama aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, serta lembaga pemasaran
3. Perbaikan tindakan (*better action*). Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
5. Perbaikan usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
6. Perbaikan pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga, dan masyarakatnya.
7. Perbaikan lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan akan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
8. Perbaikan kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga
9. Perbaikan masyarakat (*better community*). Keadaan kehidupan yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Dari berbagai pengertian pemberdayaan, dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dapat dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik dalam pengertian "kemampuan dan keberanian" maupun daya dalam arti "kekuasaan atau posisi tawar". Dalam praktek, kegiatan pemberdayaan seringkali terfokus pada upaya perbaikan pendapatan (*income generating*), dan kemandirian. Mandiri disini bukan berarti menolak bantuan "pihak luar" tetapi kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik dengan pertimbangan:

1. Keadaan sumberdaya yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan.
2. Penguasaan dan kemampuan pengetahuan teknis untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Sikap kewirausahaan dan keterampilan manajerial yang dikuasai,
4. Kesesuaian sosial budaya dan kearifan tradisional yang diwariskan serta dilestarikan secara turun temurun

PERENCANAAN

Perencanaan, kata dasarnya rencana yang artinya rancangan, atau rangka sesuatu yang akan di kerjakan. Dari kata rencana kita bisa ketahui bahwa ada tujuan yang ingin di capai. Waktu untuk mencapai tujuan dan tindakan atau upaya yang akan di lakukan. Fungsi Perencanaan adalah usaha yang sistematik dilakukan dalam rangka mencapai tujuan.

Pengertian tentang perencanaan dan kegiatan perencanaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Berbicara tentang konsep Perencanaan adalah suatu upaya dalam memilih dan menghubungkan fakta fakta dan membuat serta menggunakan asumsi asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Susanto, 2016), yang terkait dengan tata ruang (Guttenberg, 2009), dapat disusun berdasarkan beberapa kriteria, antara lain menurut jangka waktu, menurut ruang lingkup atau tingkat keluwesan. (Kunarjo, 2002).

Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan untuk menyusun suatu rencana (*Plan*). (Anshar, 2014). Perencanaan dapat juga sebagai sebuah fungsi manajemen untuk pengambilan keputusan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut George R. Terry, dalam Anshar 2014, perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, dan membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

Menurut Conyers dan Hills dalam Anshar 2014, Perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Dalam perjalanannya, timbul berbagai bentuk perencanaan yang merupakan alternatif-alternatif ditinjau dari berbagai sudut antara lain :

1. Dari segi jangka waktu, perencanaan dapat dibedakan : a) perencanaan jangka pendek (1 tahun), dan b) perencanaan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
2. Dari segi luas lingkungannya, perencanaan dapat dibedakan : a) perencanaan nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan suatu bangsa dalam berbagai bidang), b) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu), dan c) perencanaan lokal, misalnya; perencanaan kota (untuk mengatur pertumbuhan kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah corak kota) dan perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan masyarakat desa tersebut).
3. Dari segi bidang kerja yang dicakup, dapat dikemukakan antara lain : a) industrialisasi, b) agraria (pertanahan), c) pendidikan, 4 d) kesehatan, e) pertanian, f) pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.
4. Dari segi tata jenjang organisasi dan tingkat kedudukan menejer, perencanaan dapat dibedakan: a) perencanaan haluan (*policy planning*), b) perencanaan program (*program planning*) dan c) perencanaan langkah (*operational planning*).

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Perencanaan yang baik akan mampu meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan dalam pembangunan

Secara sederhana perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2016), sebagai metode yang berbeda secara analitis untuk memberi informasi dan membuat kebijakan dan keputusan publik (Wildavsky, 1973) Dengan demikian perencanaan adalah suatu upaya

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dalam rangka mencapai suatu tujuan yang di dasarkan dengan pengetahuan, data dan fakta yang terkait yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, dan penyebaran informasi/fakta kepada pihak pihak terkait.

Perencanaan melibatkan unsur fakta, tujuan dan arah kebijakan. Fakta adalah kondisi saat ini sebagai titik awal yang di perlukan dalam menentukan tujuan perencanaan. Perencanaan juga mengandung unsur unsur normatif yang terukur. Tujuan merupakan kondisi yang di harapkan tercapai pada kurun waktu tertentu dan arah kebijakan merupakan rambu rambu atau petunjuk yang membolehkan atau tidak suatu cara dilakukan dalam mencapai tujuan. Perencanaan dapat juga diartikan sebagai proses pengambilan keputusan untuk masa depan dengan menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia. Tujuan dari penerapan pilihan tentunya untuk masa depan yang lebih baik.

Perencanaan yang baik akan di cirikan sejauh mana rencana yang di buat berperan sebagai penuntun untuk menuju perubahan yang lebih baik dan target yang menjadi tujuan. Perencanaan yang baik tidak hanya dapat memberikan gambaran tujuan yang akan di capai tetapi juga dapat memperkirakan kendala yang akan ditemukan dalam mencapai tujuan.

- a. Menurut Wahyudi (2006) Proses perencanaan pembangunan daerah merupakan:
- b. Proses politik. Pemilihan langsung kepala Daerah akan menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM
- c. Proses Teknokratik. Perencanaan yang dilakukan oleh perencanaan professional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencanaan.
- d. Proses Partisipatif. Perencanaan yang melibatkan masyarakat (Stakeholders) antara lain melalui lembaga musyawarah perencanaan pembangunan.
- e. Proses *Bottom Up* dan *Top Down*. Perencanaan yang aliran prosesnya berlangsung dari atas kebawah atau dari bawah keatas dalam hirarki pembangunan.

Sistem perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan *top down planning* dan *bottom up planning* akan menjamin adanya keseimbangan keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah (Kuncoro M, 2004), sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu (Rustiadi. et all 2009), dengan memperhatikan aspek sosial politik (Chettiparamb, 2019) yang memunculkan teori kompleksitas di dalam perencanaan. Di dalam perencanaan terdapat dua unsur penting yaitu hal yang ingin dicapai, dan bagaimana cara mencapainya. Hal yang ingin di capai meliputi Visi, Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program, dan Proyek, yang kesemuannya merupakan normatif dan terukur. (Rustiadi *et al.*, 2009). Sementara cara atau materi untuk mencapai meliputi tujuan yang normatif, strategi, kebijakan, program dan aktivitas yang semuannya haruslah terukur secara normatif.

Pembangunan tidak dapat berjalan spontan melainkan melalui proses yaitu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan pada umumnya berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu. Sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu proses yang berlangsung terus menerus yang tidak terputus membentuk sebuah siklus melingkar. Perencanaan merujuk pada hubungan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan dibutuhkan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Dengan perencanaan dapat dirumuskan berbagai kegiatan yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan sumberdaya dan potensi yang tersedia dan tujuan yang ingin dicapai.

Perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkup nya dibedakan menjadi perencanaan sektoral, spasial dan perencanaan nasional. Dari segi tingkatan pemerintahan

dibedakan menjadi perencanaan tingkat pusat dan perencanaan tingkat daerah, dan dilihat dari dimensi waktu maka perencanaan dibedakan menjadi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan yang dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat dibedakan menjadi perencanaan bersifat *top down*, atau *bottom up planning*, dan dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut.

Berdasarkan Undang Undang No 25 Tahun 2004, dalam upaya mendorong proses pembangunan yang terpadu dan efisien perencanaan pembangunan di Indonesia mempunyai lima tujuan dan lima fungsi pokok yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Dalam pembangunan suatu wilayah diperlukan perencanaan yang tepat yang akan mengarahkan pembangunan pada suatu tujuan yang hendak dicapai serta menimbulkan dampak positif terhadap daerah itu sendiri (Simamora *et al.*, 2013). Dalam sebuah perencanaan sangat penting untuk memperhatikan kepentingan publik (Alexander, 2002), sebagai kriteria untuk mengevaluasi perencanaan dan produk produknya, kebijakan proyek dan rencana. Dari perspektif etika, kesulitan terbesar bagi perencana adalah mengambil yang terbaik. Pendekatan dalam menanggapi pembuat keputusan dan bertindak dalam kepentingan publik karena selalu menjadi subjek tekanan yang timbul dengan perubahan pemerintah, di satu sisi, dan perubahan masyarakat di sisi lain. (Nagy, 2015).

PEMBANGUNAN KAWASAN

Pembangunan adalah suatu proses menuju keadaan yang lebih baik bagi masyarakat atau sistem sosial yang dilakukan secara berkelanjutan, atau proses atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu batas ruang baik itu negara ataupun wilayah yang lebih kecil yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Todaro, (2000) pembangunan harus memiliki tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki, yaitu kecukupan (*sustenance*) memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*) untuk memilih. Todaro berpendapat bahwa pembangunan harus di pandang sebagai suatu proses multidimensional mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap sikap masyarakat, dan institusi institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Siagian (2005) dalam (Ida Bagus Made Agung dan Ince, 2016) mengatakan ada tujuh ide pokok pembangunan yaitu: 1). Pembangunan merupakan suatu proses, 2). Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, 3). Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek. 4). Rencana Pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, 5). Pembangunan mengarah pada modernitas, 6). Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan bersifat multidimensional, dan 7). Semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa

sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh pondasinya dan semakin mantap keberdaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa bangsa lain di dunia.

Pembangunan kawasan adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kesalingtergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*), masyarakat (*social system*), dan lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya (*ecosystem*). Setiap sistem ini memiliki tujuannya masing masing. Pembangunan menggunakan pendekatan kawasan telah dilakukan dan dikembangkan secara luas sejak beberapa decade yang lalu. Pembangunan kawasan meliputi pembangunan berbagai sektor yang saling terkait dan menunjang satu sama lain (Adisasmita, 2010). Pembangunan kawasan merupakan bentuk kerjasama dari berbagai sektor yang terkait, yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan. Secara umum, tujuan dari pembangunan kawasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat pedesaan, beserta sarana dan prasarana yang mendukungnya;
2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat; Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar daerah;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan konservasi sumberdaya alam demi kesinambungan pembangunan daerah.
5. Mendorong pemanfaatan ruang desa yang efisien dan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, yaitu:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.
2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah.
3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi, agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing global.
4. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan dan hortikultura, kelembagaan, dan budaya lokal.
5. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelakunya sesuai dengan semangat otonomi daerah.
6. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah, khususnya para petaninya, dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak.
7. Memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

Di pandang dari segi kepentingan daerah, pengembangan kawasan diarahkan untuk mencapai hal hal sebagai berikut (BAPPENAS, 2004) :

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat atau rakyat sekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya.
3. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan kawasan.
4. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat atau rakyat.
5. Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan dan kemandirian daerah.

Kriteria kawasan yang berhasil antara lain ada \-lah:

1. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah;
2. Mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam kawasan itu sendiri maupun di kawasan sekitarnya;
3. Memiliki keterkaitan kedepan (memiliki daerah pemasaran produk-produk yang dihasilkan) maupun ke belakang (mendapat suplai kebutuhan komponen produksinya dari daerah belakang) dengan beberapa daerah pendukung.
4. Memiliki kemampuan untuk memelihara SDA sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan Kawasan harus di pertimbangkan dengan sebaik mungkin dan dipilih dengan tepat agar kegiatan tersebut berlangsung secara produktif dan efisien (Adisasmita, 2010). Keberlangsungan secara produktif dan efisien akan berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan di masa lalu disebabkan karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program program pembangunan tidak melibatkan masyarakat.

Pada awal kemerdekaan paradigma pembangunan yang dianut oleh pemerintah adalah paradigma pembangunan industrialisasi. Sejalan perkembangan waktu, memasuki abad ke 21, paradigma pembangunan beralih ke pembangunan sektor pertanian, hal ini disebabkan pada awal abad ke 21, dilanda krisis moneter yang menyebabkan banyak industri dari berbagai jenis terpaksa menghentikan produksi karena meningkatnya ongkos produksi yang disebabkan menurunnya mata uang rupiah terhadap dollar. Tetapi pada saat yang sama sektor pertanian mengalami kenaikan pendapatan karena nilai produk pertanian yang dijual keluar menjadi lebih mahal. Ketahanan sektor pertanian menghadapi krisis moneter ini yang menyebabkan pemerintah semakin memfokuskan kegiatan pembangunan dalam bidang pertanian.

Proses pembangunan bukanlah sesuatu yang alami, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana, artinya, pembangunan dilaksanakan melalui suatu proses terlebih dahulu untuk menganalisa masalah masalah dan kebutuhan kebutuhan yang harus dipenuhi, tujuan tujuan yang ditetapkan atau yang hendak dicapai, alternatif pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan tentang tata cara mencapai tujuan yang terpilih dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan resiko yang harus dihadapi. Pembangunan juga sebagai sebuah "*eco development*" yang tidak hanya berupa perubahan perubahan ekonomi, tetapi juga mencakup "*dehumanisasi*" kultur dan perubahan mentalitas masyarakat dalam suatu struktur sosial politik tertentu. Pembangunan bukan semata mata bersifat ekonomi seperti kenaikan pendapatan, pertumbuhan dan pemerataan atau hal hal lain yang diukur dengan indikator indikator ekonomi, tetapi juga mencakup aspek non materil seperti kemerdekaan berpendapat, politik, partisipasi, dan lainnya. Pembangunan dalam hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan individu individu yang senantiasa memiliki kepekaan tentang keadaan keadaan yang terjadi, masalah masalah yang sedang dan akan terjadi, dan alternatif alternatif yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah dengan kemampuan sendiri dalam mengambil keputusan dalam upaya memperbaiki mutu kehidupan masyarakat dan keluarganya.

Pembangunan adalah sesuatu yang dari oleh dan untuk masyarakat, sehingga pembangunan bukanlah kegiatan yang dilaksanakan hanya untuk kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Pembangunan bukanlah kegiatan yang dilaksanakan

oleh pemerintah untuk masyarakat tetapi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah bersama sama seluruh masyarakatnya. Untuk itu diperlukan pelibatan dan peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan dan implementasi pembangunan. Pembangunan tidak hanya fisik tetapi pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan, yang artinya pembangunan harus benar benar dimaksudkan untuk memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya, dan bukannya mengorbankan manusia dan masyarakatnya demi tercapainya tujuan tujuan pembangunan.

Demikian juga dalam proses pelaksanaan pembangunan kawasan, pelibatan dan peran serta masyarakat penting sehingga proses pembangunan kawasan dapat mencapai tujuannya untuk pembangunan manusia dan memperbaiki mutu kehidupan. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kawasan dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat, dengan mengikut sertakan mereka dalam setiap tahapan proses perencanaan, menggali informasi dan kebutuhan serta keinginan masyarakat sebagai tujuan bersama yang ingin di capai dalam perencanaan kawasan pertanian untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pemberdayaan memegang peranan penting dalam proses perencanaan kawasan, agar perencanaan yang telah di susun oleh Pemerintah untuk mencapai sasaran dan bisa dilakukan sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Peran aktif masyarakat penting dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan kawasan sehingga pada saat pelaksanaan dari hasil perencanaan dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan pada Universitas Pat Petulai untuk Suport Pendanaan yang di berikan.

DAFTAR PUSTAKA

- AT Mosher. 1966. *Getting Agriculture Moving*. New York: Frederick A.Praeger, Inc.
- Adisasmita R. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang (Pertama)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar ARE. 1999. *Desentralisasi Spatial melalui pembangunan agropolitan dengan mereplikasi kota kota menengah-kecil di wilayah pedesaan*. (1977).
- Braggion, F., Christiano, L. J., & Roldos, J. 2009. Optimal monetary policy in a "sudden stop." *Journal of Monetary Economics*, 56(4): 582–595. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2009.03.010>
- Chambers RG, & Just RE. 1982. An investigation of the effect of monetary factors on agriculture. *Journal of Monetary Economics*, 9(2): 235–247. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(82\)90044-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(82)90044-7)
- Erbaugh J, Bierbaum R, Castilleja G, da Fonseca GAB, & Hansen SCB. 2019. Toward sustainable agriculture in the tropics. *World Development*, 121:158–162. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.002>
- Hadi AP. 2015. Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*, (1987), 1–14.
- Kementrian Pertanian. 2014. *Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045*. Biro

- Perencanaan Sekretariat Jendral Kementrian Pertanian.
- Mardiakanto Totok dan Soebiato Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (4 ed.). Bandung: Penerbit ALFABETA Bandung.
- Noer M. 2004. Pembangunan berbasis kelembagaan adat: sebuah alternatif pembelajaran dari kasus kinerja kelembagaan. *Mimbar*, XXII No.(2 April-Juni 2006), 235–258.
- Popescu, D.-L. 2014. Subsistence/Semi-subsistence Agricultural Exploitations: Their Roles and Dynamics within Rural Economy/Rural Sustainable Development in Romania. *Procedia Economics and Finance*, 16(May), 563–567. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00840-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00840-5)
- Rahmedi Yonis. 2010. *Model Perencanaan Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian di Sumatera Barat (Participatory Planning Model on Agricultural Development Planning in West Sumatera)*. Universitas Andalas.
- Rustiadi E, Saefulhakim SDR. 2009. *Perencanaan dan pengembangan wilayah* (ke 4 Mei 2; A. E. Pravitarsari, ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soetrisno. Suwandari A. 2016. *Pengantar Ilmu Ilmu Pertanian*. Malang, Jatim: Intimedia Kelompok Intrans Publishing.
- Sudalmi SE. 2010. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. *Inovasi*, 9(2), 15–27.
- Suharyanto S, & Sofianto A. 2012. Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*, 04(04), 251–260. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.251-260>
- Sulistiyowati A. 2018. Model Pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kawasan eks Lokalisasi. *Aplikasi Administrasi*, 21(2), 108–120.
- Sumodiningrat G. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* (Kedua). Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Susanto A. 2016. Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*.
- Sukino. 2014. *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani* (1 ed.; Eri, ed.). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wrihatnolo RR dan Dwijoyowiyoto RN. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.